

PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph>



MODERASI BERAGAMA DARI MASA KE MASA: TELAAH HISTORIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA

Josua Chariston Simanungkalit¹, Ernida Marbun², Pebriyan Simanungkalit³
Universitas Satya Terra Bhinneka, Medan, Indonesia¹², Sekolah Tinggi Guru Huria
HKBP, Tapanuli Utara, Indonesia³

josuacharistonsimanungkalit@satyaterrabhinneka.ac.id¹,
ernidamarbun@satyaterrabhinneka.ac.id², simanungkalitpebriyan@gmail.com³

Accepted: 17 Juli 2026

Published: 20 Juli 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis perjalanan moderasi beragama di Indonesia dari waktu ke waktu dan menggali implikasinya bagi kehidupan bangsa di tengah tantangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis-antropologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur tentang sumber primer (buku Sutasoma, manuskrip kesultanan, dan dokumen resmi negara) dan sumber sekunder (jurnal, buku, dan laporan penelitian). Analisis dilakukan melalui empat tahap metode historis: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, menggunakan teori kontinuitas dan perubahan dari John Obert Voll dan teori konstruksi sosial. Hasil penelitian menemukan tiga periodisasi utama. Pertama, moderasi beragama berakar sejak kerajaan Hindu-Buddha melalui falsafah Bhinnêka tunggal ika dan diperkuat oleh dakwah budaya Walisongo pada abad ke-15 dengan indikator-indikator komitmen nasional, toleransi, non-kekerasan, dan akomodasi budaya. Kedua, nilai ini dilembagakan melalui organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta kebijakan negara dari Orde Baru hingga Reformasi, yang melahirkan konsep Tri Kerukunan dan strategi nasional Moderasi Beragama. Ketiga, di era digital, moderasi beragama beradaptasi menghadapi tantangan radikalisme dan disrupsi informasi melalui pemanfaatan media digital seperti NU Online. Penelitian menyimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan warisan sejarah yang dinamis dan adaptif, serta tetap relevan sebagai strategi nasional untuk memperkuat kohesi sosial dan menjaga integritas NKRI.

Keywords: *Moderasi Beragama, Sejarah Nusantara, Toleransi, Kebangsaan*

How to Cite: Simanungkalit, J. C., et.al (2026) Moderasi Beragama Dari Masa Ke Masa: Telaah Historis Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Berbangsa. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (104-114)

*Corresponding author:
josuacharistonsimanungkalit@satyaterrabhinneka.ac.id

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Moderasi beragama bukanlah fenomena baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Meskipun istilah ini secara resmi dikampanyekan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 sebagai strategi nasional untuk memelihara identitas Indonesia yang beragam, akar sejarahnya telah membentang jauh melampaui batas-batas zaman modern (Ahmad & Saepudin, 2023). Kesadaran akan pentingnya hidup dalam harmoni dalam heterogenitas telah lama menjadi bagian dari alasan sosial masyarakat nusantara, bahkan jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai negara-bangsa (Kurniawan & Maknun, 2023). Moderasi beragama, dalam arti cara pandang, sikap, dan praktik religius yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman, sebenarnya telah dipraktekkan oleh pelaku sejarah dari berbagai etnis di Indonesia sejak masa komersial hingga saat ini (Tarupay, 2023).

Keberagaman agama dan kepercayaan di Nusantara bukanlah kenyataan yang lahir bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia. Sejak berabad-abad yang lalu, kepulauan ini telah menjadi tempat bertemunya berbagai tradisi agama Hindu, Buddha, dan lokal yang kemudian hidup berdampingan dengan Islam, Kristen, Katolik, dan Konfusianisme. Pada masa Kerajaan Majapahit, misalnya, kesadaran akan pentingnya kerukunan antar umat beragama telah diabadikan dalam buku *Sutasoma* karya Empu Tantular. Dalam Puisi 139 bait kelima ditulis: "Rwaneka dhatu winuwus budha wisma, Bhinnêki rakwa ring but kena parwanosen, kemudian ng jinatwa dengan siwatatwa tunggal Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa". Kata *Bhinnêka tunggal ika* dari syair ini kemudian diadopsi sebagai motto bangsa Indonesia, pengakuan filosofis bahwa perbedaan tidak dapat dihindari dan persatuan adalah tujuannya. Syamsul Kurniawan dan Moch. Lukluil Maknun menegaskan, bukti tertulis seperti prasasti dan manuskrip menunjukkan bahwa kesadaran hidup harmonis dalam situasi

heterogenitas sudah ada sejak lama di Nusantara (Kurniawan & Maknun, 2023).

Memasuki masa Islamisasi nusantara, moderasi beragama menemukan momentumnya yang paling signifikan. Islam masuk ke Indonesia bukan melalui kekerasan atau paksaan, tetapi melalui proses interaksi perdagangan dan saluran budaya yang berlangsung secara damai (Umar, 2021). Pedagang Muslim perlahan dan bertahap memperkenalkan Islam toleran yang menjunjung tinggi kesetaraan status. Selanjutnya, Islam dibawa ke Indonesia oleh guru sufi atau tasawuf yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ajaran. Islam sufistik ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk lebih akomodatif dan inklusif terhadap tradisi dan praktik keagamaan lokal. Seperti yang dicatat oleh Anthony Reid di Asia Tenggara di Zaman Perdagangan, 1450-1680 (Reid, 2017), ada kesinambungan antara tradisi pertapaan Hindu-Buddha dengan masuknya Islam melalui guru Sufi di Jawa yang memudahkan Islam untuk diterima di Nusantara. Karakteristik penyebaran Islam yang damai dan akomodatif ini menjadi landasan sosiologis terbentuknya Islam moderat di Indonesia, Islam yang mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya.

Di antara penyebar Islam di nusantara, Walisongo memainkan peran sentral dalam mempraktikkan dan melembagakan moderasi agama. Pada abad ke-15 Masehi, Walisongo melakukan dakwah dengan pendekatan budaya yang luar biasa cerdas: mereka menjadikan tradisi wayang, gending, ziarah, dan pertunjukan silat sebagai sarana dakwah yang paling akurat dan spektakuler. Mereka menggabungkan ajaran Islam dengan kearifan lokal, menggunakan bahasa dan budaya lokal dalam menyebarkan ajaran Islam. Wildhan Ichza Maulana dalam penelitiannya tentang konsep moderasi beragama Walisongo mengidentifikasi empat indikator moderasi yang dilakukan oleh Walisongo: komitmen nasional, toleransi, non-kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Dalam hal

toleransi, misalnya, Walisongo menunjukkan kesetaraan antara kosmologi Hindu Nawa Dewata dan kosmologi sufistiknya serta penghormatan terhadap kepercayaan agama lain (Maulana, 2022). Dalam hal non-kekerasan, mereka memperluas pengaruh Islam melalui ikatan keluarga dengan tokoh masyarakat dan bangsawan dan menerapkan dakwah berdasarkan humanisme agama. Sementara itu, dalam hal akomodasi budaya, mereka mengislamkan istilah-istilah dalam tradisi Hindu-Buddha dan Kapitayan dan menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan tradisi keagamaan lokal. Dengan demikian, Walisongo tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membangun peradaban baru yang menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi perdamaian. Heri Kusuma Tarupay menegaskan bahwa pengalaman sejarah dari masa komersial hingga saat ini menjadi dasar bagi tokoh-tokoh sejarah untuk merumuskan ide, ide, dan cara bertindak yang ideal bagi masyarakat Indonesia, dengan tujuan utama untuk menghilangkan intoleransi dan perilaku kekerasan (Tarupay, 2023).

Peran kesultanan nusantara juga tidak bisa diabaikan dalam narasi moderasi beragama. Choirul Fuad Yusuf menggarisbawahi bahwa kesultanan nusantara memainkan peran penting dan strategis dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara (Yusuf, 2016). Secara doktrinal, sebagian besar kesultanan nusantara mengembangkan ajaran Islam moderat. Modal budaya masyarakat Indonesia pra-Islam, di satu sisi, dan karakteristik ajaran Islam moderat yang masuk ke Indonesia, di sisi lain, membuat Islam moderat berkembang sangat cepat dan efektif sehingga pengaruhnya dapat dirasakan saat ini dalam berbagai aspek kehidupan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, dan Mataram tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat peradaban yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, menciptakan sintesis budaya yang khas nusantara.

Memasuki era gerakan nasional dan

kemerdekaan, moderasi beragama terus menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara konsisten mengambil jalan tengah dalam berbagai aspek, mulai dari penafsiran teks agama hingga sikap terhadap budaya lokal dan negara-bangsa (Yuliana, 2024). NU terkenal dengan prinsip tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan ta'adul (keadilan) dalam praktik agama, serta konsep Islam Nusantara yang menekankan Islam yang ramah budaya. Sementara itu, Muhammadiyah mengusung slogan Islam Progresif yang mendorong pembaharuan (tajdid) dan sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam murni. Kedua organisasi ini menerima Pancasila sebagai dasar negara dan berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional, yang mencerminkan kesesuaian nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Visi moderat Muhammadiyah dan NU menegaskan bahwa kedua organisasi pada dasarnya mendukung demokrasi, keadilan, dan pluralisme dalam visi agamanya, terlepas dari tantangan dinamika internal dan pengaruh gerakan transnasional (Al Hashas et al., 2025).

Peran negara dalam membentuk dan memperkuat moderasi beragama juga memiliki sejarah yang panjang. (Meliani et al., 2022) menyatakan bahwa moderasi Islam di Indonesia berkembang dalam kerangka hubungan antara negara dan masyarakat. Pemerintah dari Orde Baru hingga Reformasi memiliki peran dalam membentuk kebijakan agama moderat, misalnya melalui Departemen (sekarang Kementerian) Agama yang mengawasi semua agama resmi dan mengatur kehidupan beragama secara harmonis. (Haluti et al., 2025) menunjukkan bahwa Moderasi Beragama telah dikampanyekan oleh negara melalui berbagai program, strategi, dan agenda serupa bahkan dari era Orde Baru hingga era disruptif. Dibangun di atas konsep teologis moderasi

multi-agama dan diperkuat oleh landasan konstitusional negara, program ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan pengembangan strategi untuk menerapkan moderasi agama secara efektif dan efisien.

Namun, di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, tantangan moderasi beragama semakin kompleks. Plt. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Siti Fauziah mengingatkan bahwa rendahnya apresiasi terhadap nilai-nilai agama dan pemahaman agama yang sempit masih menjadi tantangan serius bagi persatuan bangsa. Tantangan internal lainnya adalah munculnya fanatisme regional dan kurangnya rasa hormat terhadap keragaman. Di sisi lain, pengaruh globalisasi dan intervensi kuat kekuatan global juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan nasional. Media sosial dengan perannya sebagai pedang bermata dua merupakan sarana kebaikan di satu sisi dan berpotensi menjadi alat untuk memecah belah bangsa di sisi lain semakin memperumit lanskap keagamaan di Indonesia. Plt. Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi, mengidentifikasi tiga tantangan dalam kehidupan bernegara: pertama, pengembangan sikap, pandangan, dan praktik keagamaan yang ekstrem; kedua, pengembangan klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas kebenaran interpretasi agama; dan ketiga, pengembangan praktik keagamaan yang tidak selaras dengan cinta negara dalam kerangka NKRI.

Di sinilah urgensi analisis historis moderasi agama menjadi semakin mendesak. Memahami akar sejarah moderasi agama bukan hanya sekedar latihan akademis, tetapi upaya untuk menghidupkan kembali memori kolektif bangsa tentang bagaimana para pendahulunya—dari Empu Tantular hingga Walisongo, dari sultan nusantara hingga pendiri organisasi keagamaan—telah

merumuskan dan mempraktikkan cara hidup yang menghormati perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan mengutamakan perdamaian. Seperti yang ditekankan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta Ahmad Bahiej, perbedaan suku, budaya, dan agama di Indonesia bukanlah penghalang, melainkan sarana untuk memperkuat persatuan. Esensi dari moderasi beragama bukanlah upaya untuk memoderasi ajaran agama sendiri, tetapi untuk membangun kesadaran umat beragama agar proporsional dalam menghadapi perbedaan.

Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara historis perjalanan moderasi beragama di Indonesia dari waktu ke waktu, serta mengeksplorasi implikasinya terhadap kehidupan bangsa. Melalui pendekatan historis, diharapkan dapat ditemukan benang merah yang menghubungkan praktik moderasi beragama di masa lalu dengan tantangan dan peluang masa kini, serta merumuskan relevansinya untuk memperkuat kohesi sosial dan ketahanan nasional di tengah perubahan zaman Indonesia.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah (Yogatama, 2018). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu menelusuri secara sistematis perjalanan moderasi beragama di Indonesia dari waktu ke waktu dan menggali implikasinya terhadap kehidupan bangsa. Penelitian sejarah memungkinkan peneliti untuk secara objektif merekonstruksi masa lalu melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sistematisasi bukti untuk menetapkan fakta dan menarik kesimpulan yang kuat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri proses terbentuknya moderasi beragama, kontinuitas, perubahan, dan perkembangannya dari zaman kerajaan nusantara, masa Islamisasi, era gerakan nasional, hingga era kontemporer. Selain

pendekatan historis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis-antropologis untuk memahami interaksi moderasi agama dengan struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia, dan budaya, termasuk mengungkap alasan mengapa moderasi beragama menjadi isu penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari sumber-sumber sejarah yang relevan dengan moderasi agama, antara lain: buku-buku klasik seperti *Sutasoma* oleh Empu Tantular sebagai sumber awal konsep Bhinnêka tunggal ika; manuskrip kuno dan manuskrip kesultanan nusantara; kitab-kitab tafsir dan hadits seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir At-Thabari, Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim; serta dokumen resmi negara, seperti buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Interpretasi Tematik Moderasi Beragama. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, laporan penelitian, disertasi dan tesis, arsip berita, serta sumber informasi dari media online dan offline terkait moderasi agama (Zakaria, 2024). Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis yang mencakup rentang waktu yang panjang, dari periode klasik hingga kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan yang intensif. Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan terkait masalah yang akan dipecahkan. Proses studi literatur ini diambil sebagai tindakan untuk mengumpulkan sejumlah data yang valid dan akuntabel atas kebenarannya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi atau kritik sumber (pengujian keaslian dan kredibilitas), interpretasi (interpretasi fakta sejarah), dan historiografi (menulis sejarah). Tahap heuristik dilakukan dengan menelusuri dan

mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang relevan. Tahap verifikasi meliputi kritik eksternal untuk menilai keaslian fisik sumber dan kritik internal untuk menilai kredibilitas konten sumber (Arofah, 2025).

Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis dan menafsirkan fakta sejarah yang terverifikasi, menggunakan kerangka teoritis yang relevan, termasuk teori kontinuitas dan perubahan dari John Obert Voll untuk membaca kesinambungan dan perubahan praktik moderasi agama sepanjang sejarah, dan teori konstruksi sosial untuk memahami dialektika antara agama dan budaya sebagai objek perekat sosial. Semua analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tetap mempertahankan prinsip kesinambungan sejarah untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang bagaimana moderasi agama berkembang, beradaptasi, dan mengubah dirinya dari waktu ke waktu. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah yang sistematis yang menyajikan rekonstruksi perjalanan moderasi beragama di Indonesia dan implikasinya bagi kehidupan bangsa. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menyajikan narasi sejarah kronologis, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap relevansi dan kontribusi moderasi beragama untuk memperkuat kohesi sosial dan ketahanan nasional Indonesia di tengah tantangan zaman (Susilawati & Kurnia, 2024).

RESULT AND DICUSSION

1. Akar Sejarah Moderasi Agama: Dari Kerajaan ke Islamisasi Nusantara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama bukanlah ide baru dalam sejarah Indonesia. Praktik moderasi telah terlihat sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha nusantara, terutama melalui slogan Bhinnêka Tunggal Ika yang diabadikan dalam buku *Sutasoma Karya Empu Tantular* pada abad ke-14. Moto ini adalah bukti awal dari kesadaran filosofis bahwa perbedaan tidak dapat dihindari dan persatuan adalah tujuannya. Seperti yang ditegaskan oleh

(Kementerian Agama, 2019), moderasi agama pada dasarnya adalah cara memandang, sikap, dan praktik keagamaan dalam kehidupan bersama dengan mewujudkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun manfaat. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Suhail et al., 2025) yang menyatakan bahwa kesadaran akan pentingnya hidup harmonis dalam situasi heterogenitas telah lama diabadikan dalam prasasti dan manuskrip nusantara.

Memasuki masa Islamisasi Nusantara, praktik moderasi beragama menemukan bentuknya yang paling konkret melalui dakwah Walisongo pada abad ke-15 Masehi. Berdasarkan penelitian (Maulana, 2022), konsep moderasi keagamaan Walisongo dapat dipetakan menjadi empat indikator yang telah digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia hingga saat ini, yaitu komitmen nasional, toleransi, non-kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Dalam hal komitmen nasional, Raden Patah menunjukkan nasionalisme dengan berjanji setia kepada kerajaan Majapahit dan menetapkan undang-undang Kutara Manawa Dharmashastra sebagai konstitusi Kesultanan Demak. Sikap toleran Walisongo tercermin dalam khatulistiwa kosmologi Hindu Nawa Dewa dengan kosmologi sufistik mereka, serta penghormatan terhadap nilai-nilai keyakinan agama lain, seperti larangan menyembelih sapi untuk menghormati umat Hindu. (Reid, 2017) juga mencatat bahwa kesinambungan antara tradisi pertapaan Hindu-Buddha dan masuknya Islam melalui guru-guru Sufi di Jawa memudahkan Islam untuk diterima di Nusantara.

Sikap anti-kekerasan diwujudkan melalui perluasan pengaruh Islam melalui ikatan keluarga dengan tokoh masyarakat dan bangsawan, bukan melalui cara-cara kekerasan. Sunan Ampel dan Sunan Gunungjati memilih pendekatan kekerabatan untuk menyampaikan Islam secara damai, sedangkan Sunan Gresik melakukan dialog intensif dengan penguasa Majapahit sehingga

Islam mendapatkan legitimasi. Akomodasi dengan budaya lokal dapat dilihat dari Islamisasi istilah-istilah dalam tradisi Hindu-Buddha dan Stuttgart, di mana Walisongo menjadikan tradisi wayang, gending, ziarah, dan pertunjukan silat sebagai sarana dakwah yang paling akurat dan spektakuler. (Tarupay, 2023) menekankan bahwa pengalaman sejarah dari masa komersial hingga saat ini menjadi dasar bagi tokoh-tokoh untuk merumuskan cara bertindak yang ideal bagi rakyat Indonesia, dengan tujuan utama untuk menghilangkan intoleransi dan perilaku kekerasan.

Tabel 1. Indikator Moderasi Beragama Walisongo

Indikator Moderasi		Implementasi Walisongo
Komitmen Nasional		Ikrah setia kepada Majapahit; pembentukan Kutara Manawa Dharmashastra sebagai konstitusi Demak
Toleransi		Penyetaraan kosmologi Nawa Dewata dengan kosmologi sufistik; Menghormati nilai-nilai keyakinan agama lain
Anti-Kekerasan		Pendekatan kekerabatan dengan tokoh masyarakat; diplomasi dengan penguasa Majapahit
Akomodasi Budaya Lokal		Islamisasi istilah Hindu-Buddha dan Kapitayan; Penggunaan boneka, geng, ziarah sebagai sarana dakwah

Sumber: Penulis, 2025

Temuan tentang Walisongo ini menunjukkan bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian integral dari sejarah panjang pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Jika karakter ekstrem berkembang, tidak mungkin Islam dapat tumbuh dan berkembang pesat di nusantara. Dalam kerangka teorikontinuitas dan perubahandari (Voll, 2019), praktik moderasi Walisongo mewakili Kesinambungan (kelanjutan) nilai-nilai toleransi dan akomodasi budaya yang telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, serta Pertukaran (perubahan) dalam bentuk adaptasi ajaran Islam dengan konteks lokal nusantara. Pola dakwah budaya Walisongo merupakan landasan sosiologis bagi pembentukan karakter Islam Indonesia yang moderat dan

inklusif yang mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Dengan kata lain, moderasi beragama bukanlah konstruksi yang dibuat oleh negara modern, melainkan warisan leluhur yang terus diperkuat dari generasi ke generasi, seperti yang juga ditegaskan oleh Yusuf (2016) bahwa secara doktrinal, kesultanan nusantara mengembangkan ajaran Islam moderat yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal.

2. Pelembagaan Moderasi Beragama melalui Organisasi Islam dan Negara

Temuan penelitian dari periode gerakan nasional hingga era Orde Baru menunjukkan bahwa moderasi beragama mengalami proses pelembagaan melalui dua saluran utama: organisasi Islam massa dan kebijakan negara. Ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada tahun 1926 dan Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 menjadi aktor sentral dalam mempraktikkan dan menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat. (Hakim et al., 2024) menunjukkan bahwa organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah tidak hanya berperan dalam gerakan politik, tetapi juga aktif memajukan pendidikan, kesetaraan gender, dan kerukunan sosial melalui Wasathiyah. (Hilmy, 2013) Laporan ini juga menegaskan bahwa kedua OMS pada dasarnya mendukung demokrasi, keadilan, dan pluralisme dalam visi agama mereka, terlepas dari tantangan dinamika internal dan pengaruh gerakan transnasional.

Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, nilai-nilai Islam yang inklusif dan adaptif memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas nasional, dengan kompromi Piagam Jakarta sebagai bukti nyata moderasi politik Islam Indonesia. Islam Nusantara merupakan jembatan antara tradisi dan modernitas, dengan bukti konkret seperti pembangunan Terowongan Silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral sebagai simbol toleransi. (Anwar &

Nurhakim, 2024) mengidentifikasi bahwa sejak Orde Lama, negara telah mengeluarkan kebijakan terkait kehidupan beragama, seperti Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, yang kemudian diikuti dengan berbagai kebijakan di era berikutnya.

Di sisi lain, negara melalui Kementerian Agama juga berperan penting dalam melembagakan moderasi beragama. (Sirajuddin, 2020) menunjukkan bahwa Moderasi Beragama dikampanyekan oleh negara melalui berbagai program, strategi, dan agenda serupa yang dimulai bahkan dari era Orde Baru hingga era disruptif. Pada masa Orde Baru, Menteri Agama K.H. Moh. Dachlan mempopulerkan istilah "Kerukunan Kehidupan Religius" yang kemudian menjadi istilah standar dalam dokumen negara seperti GBHN. Di era Menteri Agama Mukti Ali, istilah kesepakatan dalam ketidaksepakatan (setuju dalam perbedaan) yang dimaksudkan bagi setiap umat beragama untuk menerima keberadaan orang lain yang berbeda agama. Sementara itu, di era Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, konsep Tri Kerukunan Umat Beragama diperkenalkan. Pada masa Reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan fiqh hubungan antaragama berdasarkan wawasan kultus pada era Menteri Said Aqil.

Tabel 2. Pelembagaan Moderasi Beragama melalui Organisasi Islam dan Negara

Periodisasi	Aktor/Lembaga	Kebijakan/Konsep
1912-1926	Muhammadiyah & NU	Pendekatan Wasathiyah; Islam Progresif; Tradisi Lokal
Orde Lama	Negara (Presiden)	Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama

Orde Baru	Kementerian Agama (Dachlan)	Istilah "Kerukunan Kehidupan Religius" dalam GBHN
Orde Baru	Kementerian Agama (Mukti Ali)	<i>Kesepakatan dalam ketidaksepakatan</i>
Orde Baru	Kementerian Agama (Alamsyah)	Tri Kerukunan Beragama
Reformasi	Presiden Gus Dur	Perpres Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967
Reformasi	Kementerian Agama (Said Aqil)	Fiqh hubungan antaragama berdasarkan wawasan budaya
2019-sekarang	Kementerian Agama (Lukman Hakim)	Moderasi Beragama sebagai Strategi Nasional dalam RPJMN 2020-2024

Sumber: Penulis, 2025

Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama di Indonesia tidak hanya tumbuh dari bawah (*Dari bawah ke atas*) melalui organisasi keagamaan, tetapi juga diperkuat dari atas (*dari atas ke bawah*) melalui kebijakan negara. Dalam kerangka teori konstruksi sosial (Berger & Luckmann, 1967), moderasi agama adalah hasil dari dialektika antara agama, budaya, dan negara yang berlangsung secara terus menerus. Ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah menjadi agen sosialisasi nilai-nilai moderasi di tingkat masyarakat, sedangkan negara melalui Kementerian Agama memberikan kerangka kebijakan dan legitimasi formal. Keterlibatan negara ini penting karena Indonesia bukan negara sekuler atau teokratis, melainkan negara yang mengakui peran agama dalam kehidupan publik dengan tetap menjaga keberagaman, seperti yang ditegaskan oleh (Luthfi, 2016) bahwa moderasi Islam di Indonesia berkembang dalam kerangka hubungan antara negara dan masyarakat. Proses pelembagaan ini mencerminkan kesinambungan nilai-nilai moderasi yang telah ada sejak zaman Walisongo, serta pertukaran dalam bentuk pelembagaan melalui organisasi modern dan kebijakan

negara. (Sirajuddin, 2020) menyimpulkan bahwa meskipun radikalisme belum sepenuhnya dihilangkan, setidaknya negara telah berkomitmen untuk menumbuhkan kerukunan dan moderasi beragama melalui kebijakan inklusif.

3. Moderasi Beragama di Era Kontemporer: Tantangan dan Relevansi Kebangsaan

Temuan penelitian di era kontemporer menunjukkan bahwa meskipun moderasi beragama memiliki akar historis yang kuat dan telah dilembagakan melalui berbagai organisasi dan kebijakan negara, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial merupakan salah satu tantangan terbesar. Kehadiran media sosial cukup cepat menjadi tantangan bagi upaya menyuarakan moderasi agama, karena keinginan untuk cepat update dan kemudahan terputusnya konteks informasi membuat publik seringkali hanya melihat sebagian dari informasi. (Wahid et al., 2023) mencatat bahwa masih ada peningkatan kasus intoleransi di ruang publik, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Isu-isu agama yang sering dijadikan alat politik, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, dan rendahnya pemahaman tentang moderasi beragama menjadi tantangan serius bagi upaya penguatan toleransi nasional.

Di sisi lain, tantangan internal juga muncul dari praktik keagamaan yang ekstrem, klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas kebenaran tafsir agama, serta perkembangan praktik keagamaan yang tidak selaras dengan cinta negara dalam kerangka NKRI. Seperti yang diingatkan oleh (Mubarok & Sunarto, 2024), apresiasi nilai-nilai agama yang lemah dan pemahaman agama yang sempit masih menjadi tantangan serius bagi persatuan bangsa. Namun, penelitian ini juga menemukan upaya adaptif untuk menghadapi tantangan tersebut. (Kementerian Agama, 2019) menekankan bahwa moderasi agama bukanlah upaya untuk melemahkan kepercayaan, melainkan jalan tengah agar

agama tetap menjadi sumber perdamaian, bukan sumber perpecahan. Strategi penguatan moderasi beragama tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Agama saja, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

Salah satu bentuk adaptasi yang menarik adalah pemanfaatan media digital sebagai sarana penguatan moderasi beragama. Penelitian (Rofi'i & Zahroh, 2024) Sejarah dan perkembangan media NU Online menunjukkan bahwa berdirinya NU Online pada tahun 2003 dilatarbelakangi oleh kesadaran PBNU akan tertinggal wacana Islam moderat di ruang digital dan kebutuhan strategis untuk menghadirkan media resmi berbasis Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai respon terhadap dominasi narasi agama konservatif dan ekstrem. NU Online berperan strategis dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia melalui produksi wacana Islam moderat yang inklusif, toleran, dan kontekstual, serta menjadi media edukasi publik dan kontranarasi melawan radikalisme agama di ruang digital.

Tabel 3. Tantangan dan Strategi Moderasi Beragama di Era Kontemporer

Aspek	Temuan
Tantangan Internal	Fanatisme menular; pemahaman agama yang sempit; Praktik keagamaan yang ekstrem
Tantangan Eksternal	Media sosial; algoritme yang mendukung konten provokatif; Politisasi agama
Dampak Media Sosial	Menyebarkan ujaran kebencian; kemudahan konteks informasi dipotong; Hoaks
Strategi Adaptif	Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024; Keterlibatan semua kementerian
Strategi Digital	NU Online sebagai narasi tandingan radikalisme; Media Pendidikan Publik

Sumber: Penulis, 2025

Temuan tantangan kontemporer ini menunjukkan bahwa moderasi beragama menghadapi ujian yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu tantangan utamanya adalah bagaimana menyebarkan agama secara damai di tengah keberagaman budaya (era Walisongo) atau bagaimana menjaga persatuan di tengah kolonialisme (era

gerakan nasional), maka tantangan era sekarang adalah bagaimana menjaga kohesi sosial di tengah derasnya arus informasi dan fragmentasi wacana publik. Dalam kerangka teorikontinuitas dan perubahandari (Voll, 2019), nilai-nilai moderasi agama menunjukkanKontinuitaskomitmen yang kuat—komitmen nasional, toleransi, non-kekerasan, dan akomodasi budaya tetap menjadi pilar utama. Namun,*Pertukaran terjadi di media dan strategi penyampaianya: dari dakwah lisan dan budaya di era Walisongo, bergeser ke organisasi massa dan kebijakan negara di era gerakan dan Orde Baru, hingga sekarang memasuki ranah digital.* Moderasi agama di era kontemporer juga menunjukkan relevansinya yang semakin mendesak bagi kehidupan bangsa. Tiga tantangan kehidupan bernegara adalah perkembangan sikap ekstrem, klaim kebenaran subjektif, dan praktik keagamaan yang tidak selaras dengan cinta negara. Seperti yang ditegaskan oleh (Taufiq & Alkholid, 2021), perbedaan etnis, budaya, dan agama di Indonesia bukanlah penghalang, melainkan sarana untuk memperkuat persatuan. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan hanya strategi agama, tetapi strategi nasional untuk memperlakukan Indonesia sebagai negara-bangsa yang pluralistik. Sejarah panjang pertumbuhan dan perkembangan Islam Indonesia merupakan bukti nyata karakter moderat bangsa ini. Jika karakter ekstrem berkembang, kecil kemungkinan Indonesia bisa bertahan sebagai negara kesatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, tugas generasi saat ini adalah memperkuat dan memperkuat implementasi moderasi beragama sebagai warisan leluhur yang terus diperkuat di tengah tantangan zaman.

CONCLUSION

Moderasi beragama bukanlah gagasan baru, melainkan warisan sejarah nusantara, mulai dari falsafah Bhinnêka tunggal ika, dakwah budaya Walisongo dengan empat pilar moderasi (komitmen nasional, toleransi, non-kekerasan, dan akomodasi budaya), hingga pelebagaan melalui organisasi Islam massa dan kebijakan negara dari Orde Baru hingga Reformasi. Praktik ini menunjukkan adaptasi dinamis terhadap perubahan zaman, dari pendekatan lisan-budaya ke kelembagaan, kemudian ke ranah digital.

Meski menghadapi tantangan serius seperti radikalisme dan disrupsi media sosial, moderasi beragama tetap relevan sebagai strategi nasional untuk menjaga kohesi sosial dan persatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga kerukunan di tengah heterogenitas bergantung pada penguatan nilai-nilai toleransi dan akomodasi budaya yang telah teruji secara historis. Generasi saat ini berkewajiban untuk melanjutkan dan memperkuat implementasi moderasi beragama sebagai kontrak sosial nasional yang dinamis untuk keutuhan bangsa.

REFERENCES

- Ahmad, S., & Saepudin, M. (2023). *Moderasi Beragama pada Masyarakat Multietnik dan Transmigrasi*.
- Al Hashas, MN, Hakim, AL, & Alfaridzih, A. (2025). Agama, budaya, dan negara: Formulasi nasionalisme dalam pemikiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 92–116.
- Anwar, A. S., & Nurhakim, M. (2024). Pendidikan Agama Islam Dan Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia: Studi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Orde Reformasi. *Jurnal Paris Langkis*, 4(2), 177–189.
- Arofah, D. (2025). *Moderasi Beragama Din Syamsuddin terhadap Resolusi Konflik*. 2 (November).
- Berger, PL, & Luckmann, T. (1967). Aspek sosiologis du pluralisme. *Archives de Sociologie Des Religions*, 117–127.
- Hakim, L., Nasikh, M., & Marwah, R. S. (2024). Aktualisasi Nilai Pendidikan Islam Wasathiyah Dalam Memelihara Harmoni Sosial di Basis Multikultural Desa Pait. *Jurnal Tarbawi*, 14(1), 39–62.
- Haluti, F., Judijanto, L., Apriyanto, A., Hamadi, H. H., Bawa, D. L., & Kalip, K. (2025). *Moderasi Beragama: Menciptakan Suasana Kondusif Keberagaman Agama di Indonesia*. Pustaka Hijau Indonesia.
- Hilmy, M. (2013). Ke mana moderatisme Islam Indonesia? Pemeriksaan kembali visi moderat Muhammadiyah dan NU. *Jurnal Islam Indonesia*.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). *MODERASI BERAGAMA. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, S., & Maknun, ML (2023). Moderasi Beragama di Indonesia: Peluang dan Tantangannya. *Moderasi beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, dan Kontestasi di Ruang Digital*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/Brin.904.c737>.
- Luthfi, KM (2016). Islam Nusantara: Relasi islam dan budaya lokal. *SHAHIH: Jurnal Multidisiplin Islam*, 1(1), 1–12.
- Maulana, W. I. (2022). Konsep Walisongo tentang moderasi beragama dalam sejarah Islamisasi Jawa pada abad ke-15 Masehi. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 6(1), 30–44.
- Meliani, F., Iqbal, AM, Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Konsep Moderasi Islam dalam Pendidikan Global dan Multikultural di Indonesia. *Eduprof: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 195–211.
- Mubarok, A. R., & Sunarto, S. (2024). Moderasi beragama di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Studi Komunikasi Islam*, 2(1), 1–11.
- Reid, A. (2017). *Asia Tenggara di zaman perdagangan, 1450-1680*. Yale University Press.
- Rofi'i, MA, & Zahroh, SF (2024). Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Menjaga Keharmonisan Umat Beragama di Era Disrupsi Digital. *NAHNU: Jurnal Nahdlatul Ulama dan Studi Islam Kontemporer*, 2(2), 339–368.
- Sirajuddin, S. (2020). *Buku Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*. Penerbit. Zigie Utama.
- Suhail, AK, Lintang, D., Pahrudin, A., & Oktaviano, W. (2025). Azyurmardi Azra dan Moderasi Beragama di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(2), 737–754.
- Susilawati, E., & Kurnia, H. (2024). Perkembangan Agama Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Inovasi dalam Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 1(2), 87–103.
- Tarupay, HK (2023). MODERASI BERAGAMA. *Dharma Duta*, 21(2), 68–85.
- Taufiq, F., & Alkholid, AM (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2).
- Umar, H. N. (2021). *Islam Nusantara: Jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*. Elex Media Komputindo.

- Voll, JO (2019). *Islam: Kestinambungan dan perubahan di dunia modern*. Routledge.
- Wahid, Y. Z., Suaedy, A., Rahman, A. H., Azhari, MS, Nisa, N., Dja'far, A., & Fata, BS (2023). *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi The Wahid Institute Tahun 2010*. Institut WAHID.
- Yogatama, A. (2018). Penelitian sejarah relasi publik: Konsep dan metodologi. *Kitab Suci*, 8(1), 1–6.
- Yuliana, E. (2024). Moderasi Beragama Sebagai Basis Kehidupan Sosial: Telaah Filosofis Dalam Islam Kontemporer. *TADBIRUNA*, 3(2), 58–66.
- Yusuf, CF (2016). Kesultanan Nusantara dan Faham Keagamaan Moderat di Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 14(2), 457â – 478.
- Zakaria, A. (2024). *Dialektika moderasi beragama di era pluralitas agama dan budaya perspektif Al-qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.